

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton

The Effect of Financial Transparency and Accountability on the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office of Buton Regency

Wa Ode Arsy Rahmayani ^{1*}, Rasmuin ², La Didi ³

^{1*,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail:

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas Keuangan, Kinerja

Keywords: *Transparency, Financial Accountability, Performance*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,

Kode Pos 93721 Baubau,

Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email: journaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan parsial terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan secara bersama-sama (*simultaneously*) berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai F-hitung yaitu sebesar 13,918 atau dengan tingkat signifikan f sebesar $0,000 < \text{pada } \alpha = 0,05$. Adapun secara terpisah (*partial*), hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dimana tranparansi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,765 atau dengan tingkat signifikan t sebesar $0,002 < \text{pada } \alpha = 0,05$, sedangkan akuntabilitas keuangan diperoleh t-hitung sebesar 2,687 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,004 < \text{pada } \alpha = 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan baik secara bersama-sama (*simultaneously*) ataupun secara terpisah (*partial*) signifikan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Buton.

This study aims to determine the effect of transparency and accountability simultaneously and partially on the performance of the Public Works and Spatial Planning Office of Buton Regency. This study uses multiple linear regression analysis. The results showed that financial transparency and accountability simultaneously had a significant effect on performance with an F-count of 13,918 or a significant f level of $0.000 < \text{at } \alpha = 0.05$. As for separately (partial), research results also show that financial transparency and accountability have a significant effect on performance. Where transparency is obtained by a t-count of 2,765 or with a significant level of t of $0.002 < \text{at } \alpha = 0.05$, while financial accountability is obtained by a t-count of 2,687 with a significant level of t of $0.004 < \text{at } \alpha = 0.05$. Thus it is concluded that financial transparency and accountability both simultaneously and separately (partially) have a significant effect on the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Buton Regency.

PENDAHULUAN

Melalui berbagai peraturan upaya perbaikan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana diantara prinsip-prinsip good governance tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas.

Pasaribu menjelaskan bahwa transparansi perlu diwujudkan sebagai bentuk kesadaran pemerintah bahwa Masyarakat berhak mendapatkan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tranparansi menjadi ruang control dan partisipasi bagi masyarakat dalam mendorong pelaksanaan akuntabilitas (Astuti, 2013). Selain itu, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas karena berdampak positif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah (Lailatul Qodariah, 2017)

Pemerintah Kabupaten Buton dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buton sejauh ini masih dalam taraf yang baik. Hal

ini dibuktikan dengan Kabupaten Buton mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun demikian, hal ini perlu dikaji lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang terukur apakah WTP sebagai gambaran praktek transparansi dan akuntabilitas itu berpengaruh pada kinerja pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi diartikan sebagai kewajiban aparat publik menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka kepada public. Informasi harus disampaikan secara jelas dan lengkap tanpa ada yang dirahasiakan.

Dwiyanto (2006) menyebutkan beberapa indikator guna mengukur transparansi yakni: 1) keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan; 2) Kemudahan prosedur; dan 3) Kemudahan memperoleh informasi.

Transparansi yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemberian dan pengungkapan informasi penyelenggaraan aktifitas public termasuk aspek keuangan (Mardiasmo, 2006).

Dwiyanto, et all (2002) menjelaskan bahwa untuk mengukur akuntabilitas suatu pelayanan publik dapat ditinjau dari beberapa indikator, yakni: 1) Acuan pelayanan yang dipergunakan; 2) Solusi atau tindakan yang ditetapkan oleh aparat birokrasi untuk setiap kesulitan yang dialami oleh masyarakat; dan 3) Seberapa jauh aparat birokrasi memberikan prioritas pelayanan untuk memenuhi kepentingan pengguna jasa.

Secara konsep, kinerja dapat ditinjau dari sisi individu dan dari sisi organisasi secara keseluruhan. Kinerja menggambarkan capaian organisasi setelah berbagai kebijakan yang telah ditetapkan selesai dilaksanakan (Bastian, 2001:329).

Dalam penelitian ini variabel kinerja diukur dengan menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap, sedangkan variabel transparansi diukur dengan melihat indikator keterbukaan proses, kemudahan prosedur dan kemudahan akses informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas yakni acuan pelayanan, solusi dan tindakan, serta kepentingan pengguna jasa.

Penelitian ini dibangun atas tiga hipotesis penelitian bahwa Transparansi dan akuntabilitas keuangan secara simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.

Hipotesis di atas diuji dengan menggunakan statistik F Snedecor untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja dan sekaligus untuk mengetahui apakah persamaan regresi linier berganda yang diajukan dapat diterima pada taraf signifikan 0,05. Statistik F yang digunakan:

$$F = \frac{JK \text{ Reg} / k}{JKG / (n - k - 1)}$$

Dimana:

JKreg : menyatakan jumlah kuadrat regresi

JKG : menyatakan jumlah kuadrat galat

k : variabel bebas

n : jumlah data

Hipotesis statistik yang diuji adalah:

H₀: ρ = 0, dengan tandingan

H₁: ρ ≠ 0

Kriteria pengujian adalah: H_0 ditolak jika nilai F signifikan pada $p < 0,05$ dan analisis data menggunakan software SPSS. Ketiga hipotesis minor dalam penelitian ini diuji dengan statistik t-student yakni:

$$t = \frac{r_{Y \cdot X_i | X_j X_k} \sqrt{n - k - 1}}{\sqrt{1 - r_{Y \cdot X_i | X_j X_k}^2}}$$

Dimana

$r_{Y \cdot X_i | X_j X_k}$ = menyatakan koefisien korelasi antara Y dan X_i dalam kondisi X_j dan X_k dikontrol

n = jumlah data

k = banyaknya variabel bebas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain survei yang mengeksplorasi data dengan mengukur hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel (korelasi)

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan atas dugaan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tidak seimbang dengan kinerja dinas.

Waktu penelitian dilakukan secara intensif pada tahun 2022 dari bulan Februari hingga Mei. Penelitian ini merupakan penelitian Populasi, artinya semua anggota populasi menjadi sampel karena jumlahnya yang kurang dari 100, hanya 24 orang yang kesemuanya merupakan unsur pegawai organisasi yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dikumpulkan dengan metode penyebaran kuesioner, pengamatan dan studi dokumentasi.

Data primer mengenai transparansi, akuntabilitas dan kinerja dinas dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Setiap pernyataan mempunyai lima jawaban dengan rentang skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 jawaban setuju, skor 3 jawaban netral, skor 2 jawaban tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju,

Setelah jawaban angket diperoleh, dilakukan editing, coding, pemberian skor dan tabulasi untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan analisis inferensial (pengujian hipotesis) menggunakan aplikasi SPSS. Analisis diskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja. Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel terikat kinerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja.

Penerapan konsep good governance dalam kaitannya dengan upaya menciptakan pemerintah daerah dengan capaian kinerja yang baik, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan harus dapat terimplementasikan dengan baik. Hal ini karena melalui transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan di luar organisasi pemerintahan dapat mengetahui dan ikut mengontrol pelaksanaan pemerintahan.

Hasil uji simultan antar transparansi dan akuntabilitas keuangan menunjukkan nilai signifikan $< \alpha = 0.05$. Artinya transparansi dan akuntabilitas keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja pada dinas ini sangat ditentukan oleh adanya praktek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini karena transparansi dan akuntabilitas akan meminimalisir sikap silo dan mendorong terciptanya kerjasama yang baik diantara pelaku dalam organisasi. Sedang bagi public, adanya praktek transparansi dan akuntabilitas memberikan suguhan informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat sehingga hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan dinas tersebut.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja.

Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, setiap stakeholder dapat mengetahui dan mendapat kesempatan untuk turut serta mengontrol berbagai kebijakan bahkan turut serta memberikan kontribusi positif untuk setiap kebijakan yang ditetapkan atau dijalankan oleh pemerintah (Astuti, 2013).

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Temuan penelitian sejalan dengan konsep bahwa transparansi mendorong terciptanya keterbukaan berbagai informasi. Keterbukaan ini memberi banyak pihak kesempatan untuk terlibat dan para pihak juga memiliki informasi yang sesuai sehingga mendorong peningkatan kinerja organisasi. Menurut (Levy, 2007) transparansi akan menentukan seberapa baik kinerja organisasi, hal ini didukung oleh pemimpin dalam organisasi. Selain itu transparansi manajemen pemerintahan akan mendorong kinerja pelayanan publik, (Lukito, 2014).

Temuan penelitian ini sebagaimana juga temuan penelitian Shinta. Turulaki, Jantje J. Tinangon, Heince R.N Wokas. 2017, dan penelitian Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2020. Akan tetapi temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Lailatul Qodariah. 2017, bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Sebetulnya bukan hal mustahil jika transparansi berpengaruh pada kinerja, karena transparansi mendorong public untuk bersikap akuntabel terhadap semua kegiatan yang dilakukan serta mendorong partisipasi public untuk mengawasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas public bukan berdiri sendiri karena akan melahirkan terlaksananya aspek lain dalam penyelenggaraan sektor public. Transparansi erat kaitanya dengan akuntabilitas dan partisipasi, (Sulistiani, 2017), hal ini juga dikatakan (Didi, 2021), bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi memiliki hubungan erat. (Levy, 2007), (Safroni, 2012) (Dwiyanto, 2014).

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban organisasi terhadap atas segala aktifitasnya yang wajib disampaikan kepada publik. Akuntabilitas menjadi alat evaluasi capaian-capaian organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi ke depan (Mardiasmo, 2006)

Hasil perhitungan variabel akuntabilitas keuangan diperoleh t-hitung yaitu sebesar 2.687 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,004 < \alpha = 0,05$, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas yang diteliti.

Penelitian ini serupa dengan penelitan Garini, Nadia (2011) bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung. Namun berbeda dengan temuan penelitian Shinta. Turulaki, Jantje J. Tinangon, Heince R.N Wokas. 2017, penelitian Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey, 2020.

Hal yang menarik dari temuan penelitian yang diuraikan di atas adalah bahwa secara simultan, rata-rata hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi secara parsial, temuan penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi, ada yang signifikan, ada yang tidak. Hal ini berarti bahwa peningkatan kinerja organisasi hanya dapat diciptakan melalui praktek pilar-pilar good governance yang baik dan secara menyeluruh dilakukan. Tidak bisa hanya satu aspek yang dikuatkan, lalu mengabaikan aspek yang lain. Kinerja yang adalah akumulasi akhir dari berbagai aspek, sehingga kinerja yang berkualitas

membutuhkan perbaikan kualitas dari semua aspek. Hal ini tidak mudah diwujudkan, tetapi bukan berarti tidak dapat diwujudkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas, baik secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. Hal ini berarti bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan sangat menentukan kinerja pada organisasi ini.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini. Diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah agar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam proses pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan agar melakukan interaksi baik secara formal maupun informal untuk melihat dan ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Didi, L. (2001). *Pemberdayaan masyarakat desa pesisir (pendekata, teori dan konsep)*. penapersada.
- Dwiyanto. 2006. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayan Publik*. Yogyakarta. Pustaka
- Dwiyanto, A, et all. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*. Program Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- J.B. Ghartey. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Komarudin, Dan Satmoko, 2009, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*, JAI Vol 5 No. 1. 2009.
- Kusumastuti, Lukito, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lailatul Qodariah. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Levy, B. (2007). *Governance reform: Bridging monitoring and action*. The World Bank.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik; tantangan berdemokrasi kedepan*. Grasindo.
- Safroni, M. L. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan publik dalam konteks birokrasi Indonesia*. Aditya media Publishing.
- Sulistiani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.